



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PENGARAHAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

**PADA MUSRENBANG RKPD
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2018**

**Disampaikan oleh:
MENTERI DALAM NEGERI**

TJAHJO KUMOLO

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Bangka Tengah, 7 April 2017



Ir. H. JOKO WIDODO
Presiden Republik Indonesia



TJAHJO KUMOLO, SH.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



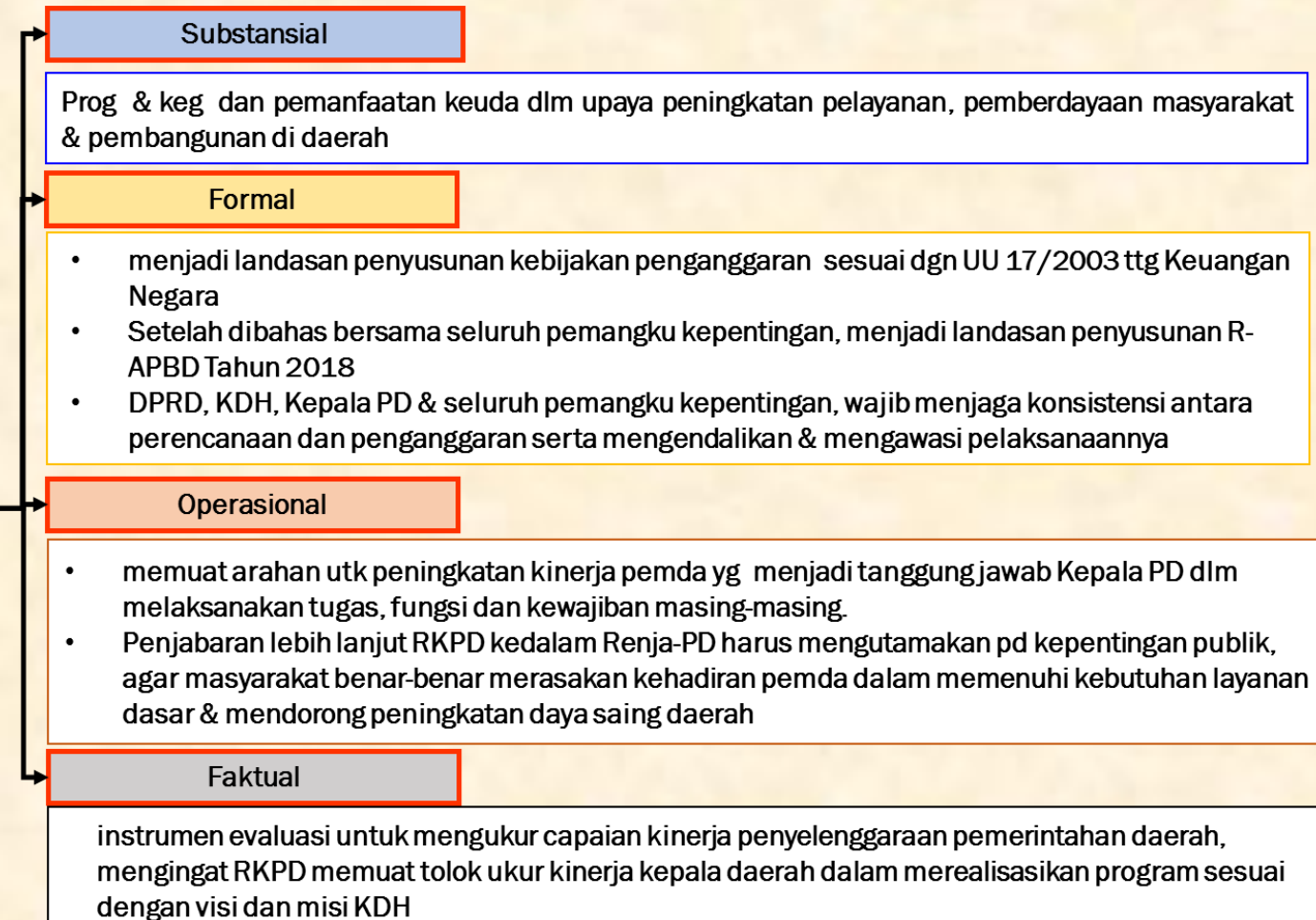
Drs. H. M. JUSUF KALLA
Wakil Presiden Republik Indonesia

NAWA CITA **2014 - 2019**

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA



KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI RKPD



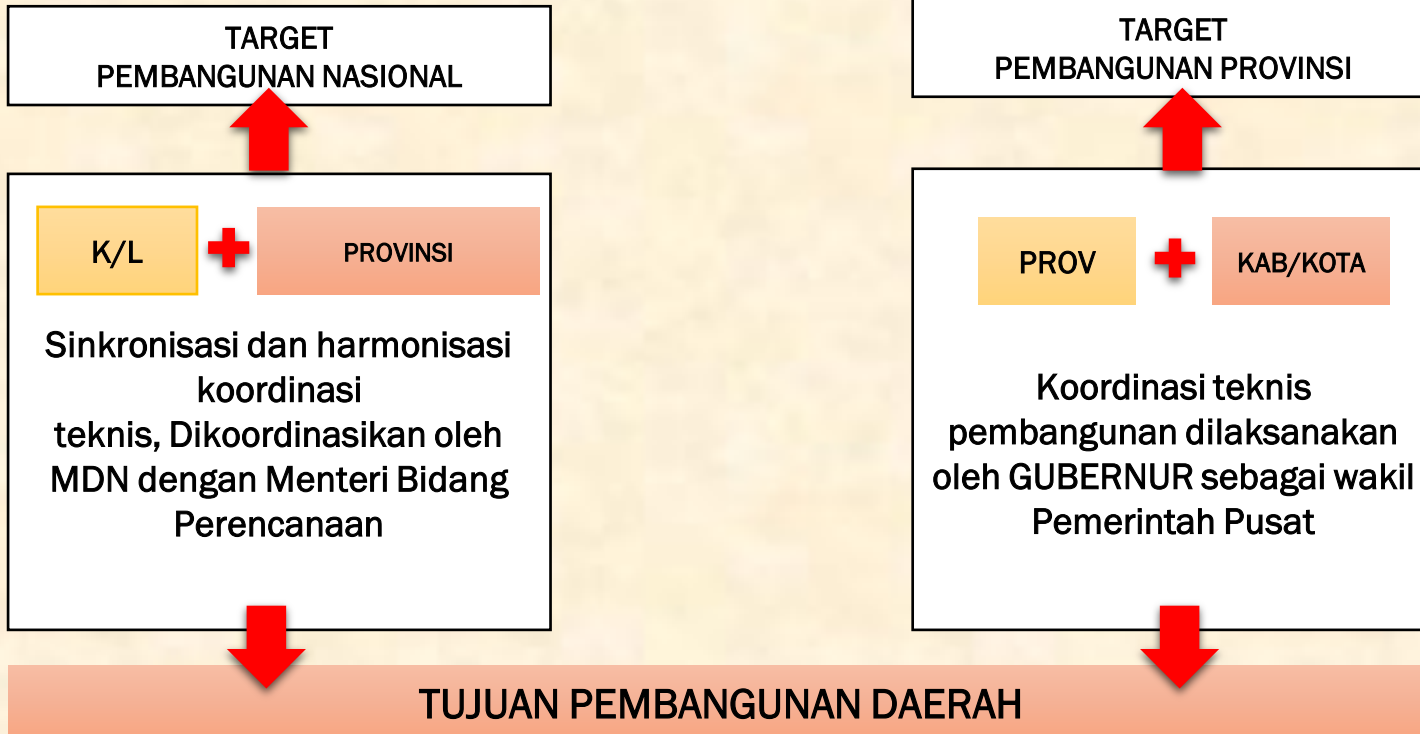
Pasal 263 ayat (4) UU 23/2014
ttg Pemda
“RKPD merupakan penjabaran
dari RPJMD”

memuat

rancangan kerangka ekonomi dan
prioritas pembangunan Daerah,
serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun”



PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (Pasal 258 & Pasal 259)



1. Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat,
2. Kesempatan kerja,
3. Lapangan berusaha,
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
5. Daya saing Daerah.



PENYELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2018

3 Dimensi Pembangunan dan NAWACITA JOKOWI-JK **RPJMN 2015-2019**

Pembangunan manusia

peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta mendukung pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air serta semangat bela Negara

Pembangunan sektor unggulan

upaya mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri

Pemerataan pembangunan antarwilayah

- peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antarkawasan
- mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah

Tema RKP Tahun 2018

Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan

Tema RKPD Tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Peningkatan Kualitas SDM Menuju Pembangunan Ekonomi yang Mandiri Berbasis Agri Bahari dan Berdaya Saing



PENYELARASAN PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NASIONAL

1. *Pendidikan;*
2. *Kesehatan;*
3. *Perumahan dan Permukiman;*
4. *Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;*
5. *Ketahanan Energi;*
6. *Ketahanan Pangan;*
7. *Penanggulangan Kemiskinan;*
8. *Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman;*
9. *Pembangunan Wilayah;*
10. *Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.*

PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG


1. *Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja;*
2. *Penurunan Tingkat Pengangguran;*
3. *Peningkatan Produksi produk potensi ekonomi lokal;*
4. *Peningkatan peluang dan kemudahan berinvestasi;*
5. *Peningkatan produksi sektor pertanian;*
6. *Pengembangan daya tarik dan pembangunan destinasi wisata;*
7. *Peningkatan pelayanan pendidikan;*
8. *Peningkatan pelayanan kesehatan;*
9. *Peningkatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan;*
10. *Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi;*
11. *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;*
12. *Peningkatan Rasio Belanja Publik Terhadap Belanja Aparatur;*
13. *Penurunan Disparitas Pembangunan antar wilayah;*
14. *Penurunan Disparitas Pembangunan antar masyarakat;*
15. *Mitigasi dan Tanggap Darurat Bencana;*
16. *Peningkatan Kualitas Lingkungan.*

**SASARAN MAKRO DALAM RPJMN 2015-2019**

Dalam Melaksanakan Pembangunan Provinsi KEPULAUAN BANGKA BELITUNG perlu dipedomani beberapa Sasaran Makro dalam RPJMN, antara lain :

NASIONAL	PERTUMBUHAN EKONOMI	KEMISKINAN	PENGANGGURAN
	6,1%	9-10,5%	5,3-5,5%

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2018 Bappenas

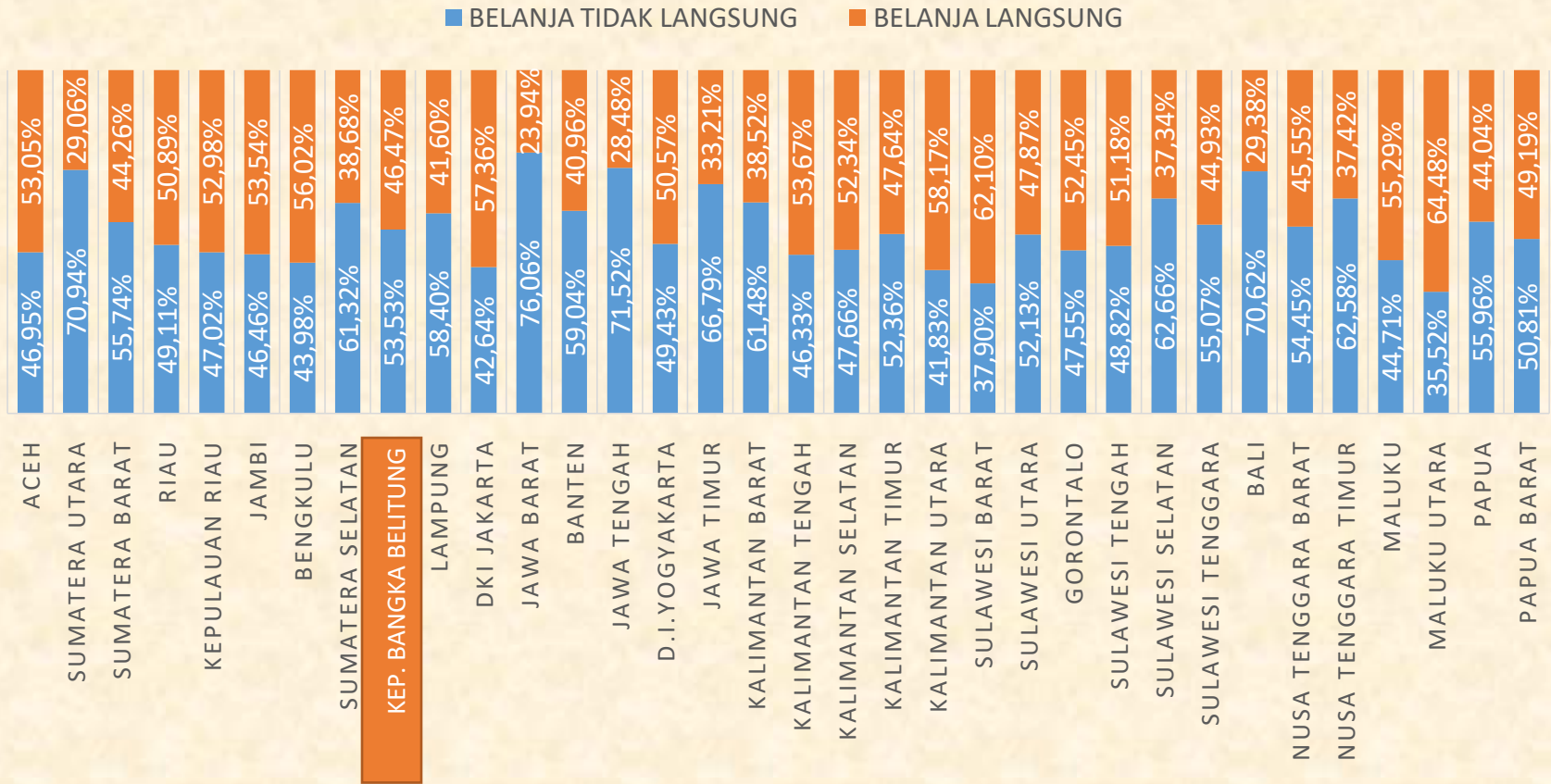


NO	PROVINSI	PERTUMBUHAN EKONOMI	KEMISKINAN	PENGANGGURAN
1.	ACEH	6,98	15,86	7,5
2.	SUMATERA UTARA	6,45	9,18	5,3
3.	SUMATERA BARAT	6,86	6,03	5,4
4.	RIAU	5,03	7,40	3,3
5.	KEPULAUAN RIAU	7,5	5,26	4,3
6.	JAMBI	6,66	7,57	2,7
7.	SUMATERA SELATAN	6,72	12,81	4,9
8.	KEP. BANGKA BELITUNG	6,26	4,42	2,9
9.	BENGKULU	6,38	16,75	3,0
10.	LAMPUNG	6,55	12,84	4,4

Sumber : Perhitungan Sementara Deputi Pengembangan Regional



PROPORSI KOMPONEN **BELANJA DAERAH** AGREGAT APBD **PROVINSI TA 2016**





Status Dokumen Perencanaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah dilakukan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri → adanya perubahan mendasar terhadap RPJPD 2005 - 2025



Masa jabatan Kepala Daerah yang telah berakhir, perlu dilakukan penyiapan penyusunan dokumen RPJMD (2017 – 2022) → RPJMD dalam tahap transisi



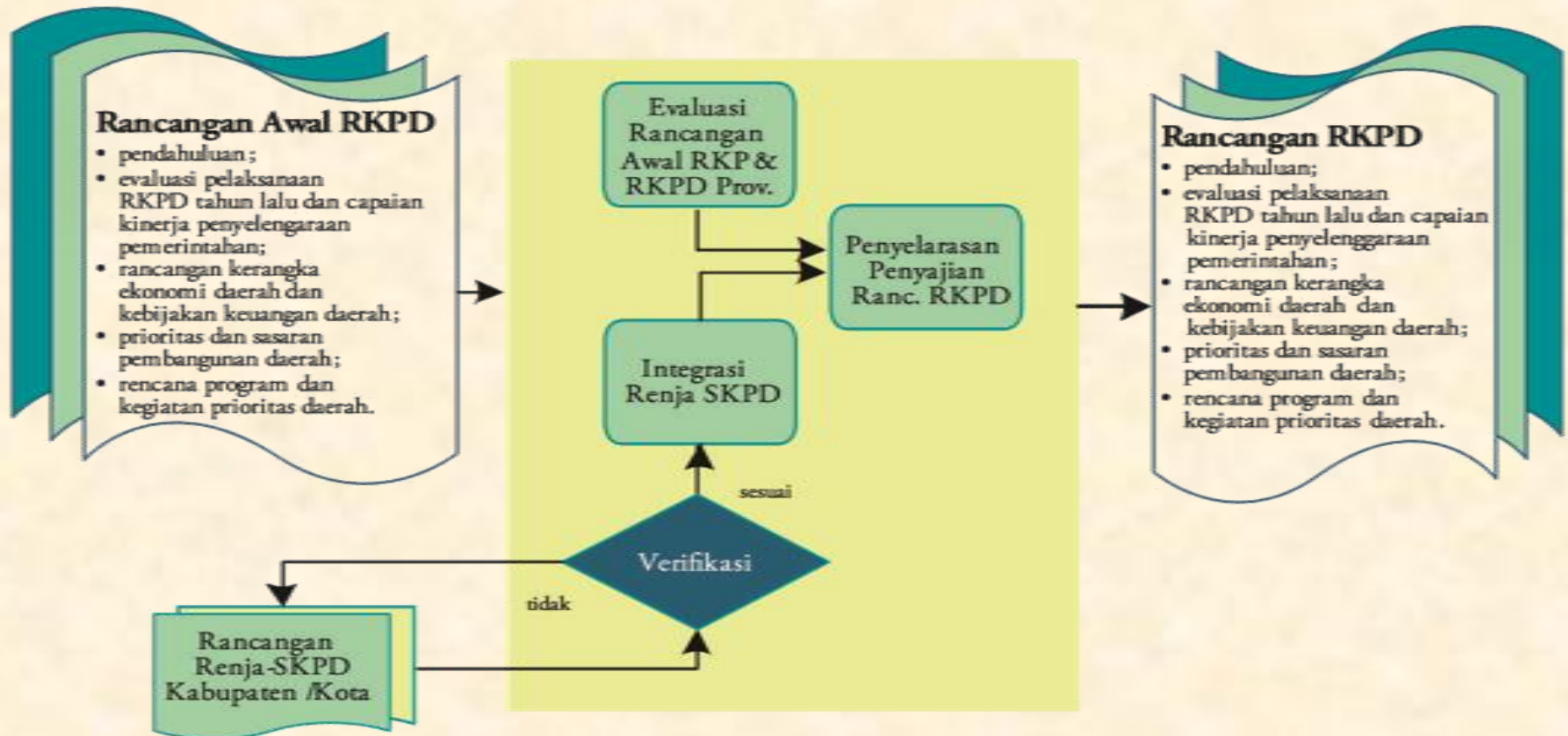
FAKTOR PENTING DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pengintegrasian SPM dilakukan pada waktu penyusunan Rancangan Awal RKPD sebagai input dalam evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penyusunan rencana program dan kegiatan





**PRIORITAS NASIONAL
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DALAM RANCANGAN RKP 2018**

1. PEMBANGUNAN WILAYAH

1. Pembangunan Pengaman Pantai Penyak (Bangka Tengah)
2. Pengembangan Bandara Udara Hanandjoeddin
3. Pembangunan Waduk Gunung Tajam (400 liter/detik)
4. Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK Tanjung Kalayang
5. Rekonstruksi struktur jalan Tanjung Pandan – Sp. Empat Sijuk

2. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penanganan Anak Tidak Sekolah



**SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**





GAMBARAN HASIL RAKORTEK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- **Total Usulan dalam Kortek**
- **Total Usulan di Kepulauan Bangka Belitung**
- **Usulan Kepulauan Bangka Belitung menurut urusan pemerintahan**
- **Usulan Kepulauan Bangka Belitung menurut Kabupaten/Kota**



1 **TOTAL USULAN DALAM RAKORTEK**

TOTAL 77.364 USULAN

TOTAL 13.658 USULAN

Usulan daerah yang Masuk

Usulan daerah yang lolos verifikasi Bappeda Kab/kota

Usulan Daerah yang Lolos Verifikasi bappeda Prov

Usulan daerah yang lolos verifikasi Bangda

Telah dibahas dalam Kortek

TOTAL 95.698 USULAN

TOTAL 51.639 USULAN

TOTAL 600 USULAN



2 TOTAL USULAN DALAM RAKORTEK UNTUK KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PROYEK K/L DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

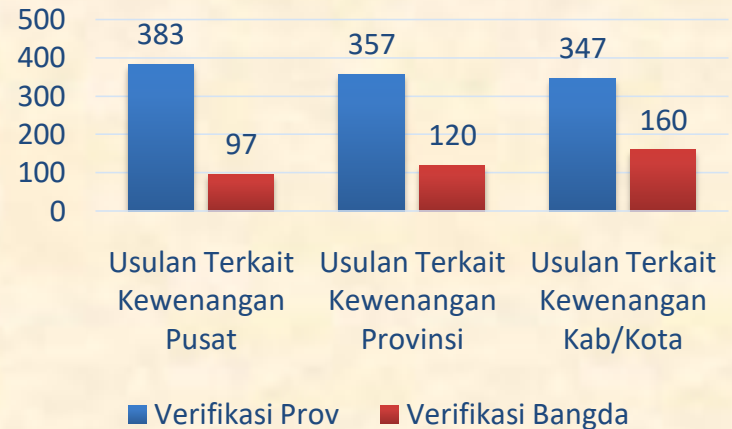
Peningkatan Jalan Kawasan Padang Mulia

2

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja (Tenaga Kerja Muda Mandiri)
2. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya Produktif)
3. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja (Teknologi Tepat Guna)
4. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya Infrastruktur Pedesaan)

TOTAL USULAN DAERAH DI KEP. BANGKA BELITUNG



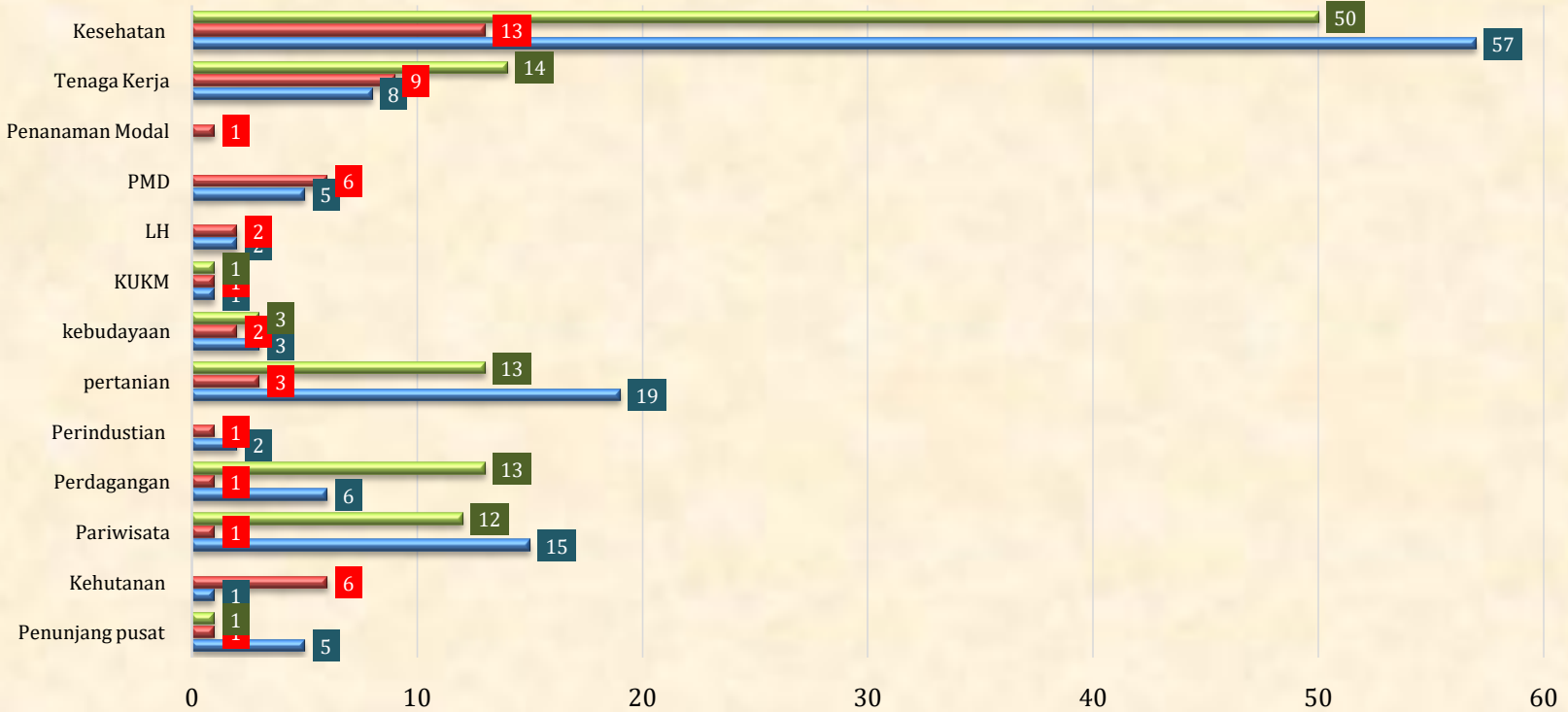


3 *TOTAL USULAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN*

USULAN DAERAH MENURUT KEWENANGAN

Kab/Kota Provinsi Pusat

DATA HASIL VERIFIKASI PROVINSI

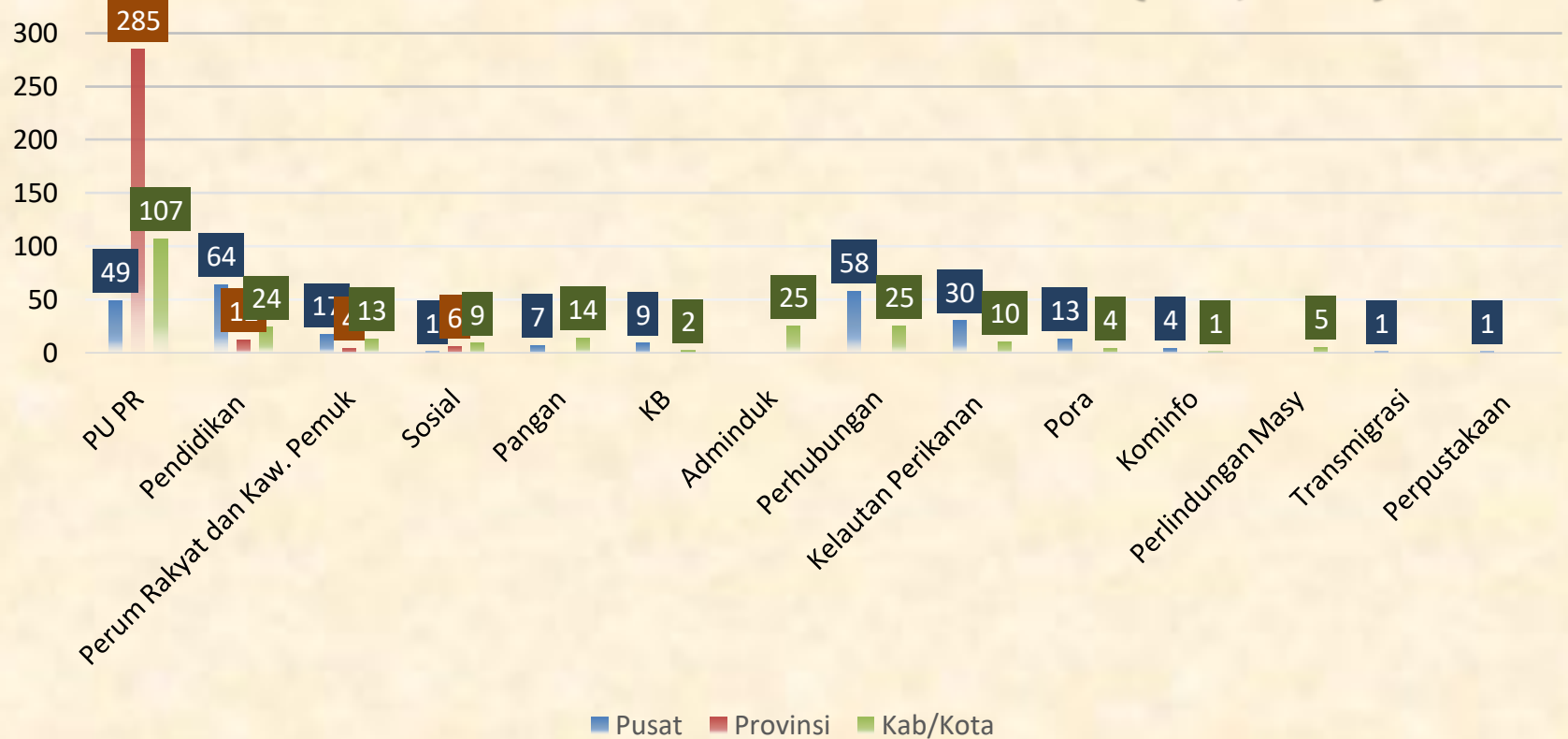




4 TOTAL USULAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

DATA HASIL VERIFIKASI PROVINSI

USULAN DAERAH MENURUT KEWENANGAN (LANJUTAN)





ISU KEMENTERIAN DALAM NEGERI



OTONOMI DAERAH

1. Berkaitan dengan direktif presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang kondusif serta dalam rangka pengawasan, terdapat 3.032 Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dibatalkan. Sebagai tindak lanjut pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut revisi terhadap perda yang dibatalkan baik revisi terbatas maupun keseluruhan.
2. Berkaitan dengan telah penataan perangkat daerah perlu ditindak lanjuti dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi, agar kinerja pemerintah daerah berjalan dengan baik.

POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Perubahan kelembagaan Kesbangpol di daerah

ADMINDUKCAPIL

Belum berjalannya secara optimal pelayanan Admindukcapil, maka Kemendagri akan menganggarkan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk 2018 sebesar Rp. 825 Milyar.

PEMERINTAHAN DESA

1. Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas.
2. Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai.
3. Pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa.



ISU KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DITJEN BANGDA

1. Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor: 050/4963/sj Nomor: 0430/m.ppn/12/2016 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019;
3. Belum optimalnya pencapaian target pembangunan nasional, Kemendagri telah melakukan Rakortek Pembangunan Tahun 2017 (Regional I Batam-Regional II Makassar)
4. Hasil Rakortek agar dijadikan bahan pembahasan prioritas pada Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional.



PENUTUP

PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Kementerian Dalam Negeri bersama dengan daerah akan mengawal hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2018 serta penyempurnaan RKP Tahun 2018 melalui Musrenbangnas.
2. Kementerian Dalam Negeri melihat kesesuaian antar dokumen perencanaan pusat dan daerah (RKPD dengan RPJMD dan RKP).
3. Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi APBD dalam rangka konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH DAERAH

1. Hasil Musrenbang dijadikan bahan untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;
2. RKPD sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2018;



TERIMA KASIH

